

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan tradisional. *E-Government* diharapkan mampu menjadi solusi dalam mempercepat distribusi bantuan dan memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh layanan yang mereka butuhkan tanpa harus melalui prosedur yang rumit atau membutuhkan kehadiran fisik. Selain itu, *E-Government* juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk memantau secara lebih efektif penerima bantuan dan mencegah penyelewengan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah menjadi fenomena global yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan publik dan pemerintahan. Di era digital ini, pemerintah semakin banyak menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan praktis. Salah satu bentuk implementasi teknologi dalam pemerintahan adalah e-governance, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi dalam proses pembuatan keputusan.

Pada tahap perencanaan, dinamika politik dalam penerapan *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)* di Desa Taraju mencerminkan persoalan koordinasi antar lembaga pemerintahan yang belum terbangun secara sinergis. Penentuan basis data penerima bantuan sosial yang

menjadi pijakan utama program masih dipengaruhi oleh proses politik birokrasi, di mana kepentingan institusional antara pemerintah desa, Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), dan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sering kali tidak berjalan seimbang. Ketergantungan pada data lama yang bersumber dari masa pandemi Covid-19 (2020–2022) menunjukkan bahwa proses perencanaan kebijakan belum diiringi oleh pembaruan data yang partisipatif dan berjenjang, melainkan masih bersifat top-down. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan e-government yang berbasis data digital dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis (Data DTKS Desa Taraju, 2024).

Menurut Indrajit (2002), keberhasilan implementasi e-government dalam model Government to Government (G2G) sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi politik antar lembaga pemerintahan. Dalam konteks Taraju, mekanisme komunikasi vertikal antara pemerintah kabupaten dan desa belum berjalan secara efektif, sehingga proses pembaruan data sering tertunda karena perbedaan otoritas dan kepentingan administratif. Akibatnya, perencanaan program pengentasan kemiskinan berbasis e-government justru menjadi arena negosiasi politik antar lembaga, bukan sekadar proses teknokratis yang objektif. Fenomena ini juga didukung oleh temuan Purwanti (2023) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data dalam sistem SIKS-NG umumnya dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah. Senada dengan itu, Ramadan et al. (2024) menegaskan bahwa tanpa mekanisme verifikasi dan validasi data yang berkesinambungan, sistem e-government hanya menjadi formalitas digital yang belum mampu mengatasi bias politik dan administratif

dalam perencanaan bantuan sosial. Dengan demikian, dinamika politik pada tahap perencanaan di Desa Taraju menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan e-government tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada keseimbangan relasi kekuasaan antar lembaga pemerintah dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Pada tahap pelaksanaan, dinamika politik dalam implementasi *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)* di Desa Taraju tidak hanya ditandai oleh hambatan teknis, tetapi juga oleh kompleksitas koordinasi antar lembaga pemerintahan. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempercepat validasi dan penyaluran bantuan sosial, dalam praktiknya muncul tensi politik dan birokrasi antara pemerintah desa, Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), serta Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari belum optimalnya mekanisme koordinasi G2G yang seharusnya mempermudah arus informasi, tetapi justru sering terhambat oleh perbedaan otoritas dan kepentingan antar aktor pemerintah (Indrajit, 2002).

Dinamika ini diperparah oleh faktor struktural seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, kapasitas aparatur yang masih rendah, serta ketergantungan desa terhadap keputusan dan kebijakan tingkat kabupaten. Akibatnya, proses penginputan dan verifikasi data penerima bantuan sosial sering kali tertunda karena adanya hierarki keputusan dan kurangnya otonomi teknis di tingkat desa. Andriani et al. (2023) menemukan bahwa hambatan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain, di mana keterbatasan infrastruktur, kemampuan teknis, dan sumber daya keuangan memperlambat kinerja sistem

digital. Senada dengan itu, Shelfiyana Yulfa et al. (2019) menekankan bahwa lemahnya kompetensi aparatur desa menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap aktor pemerintah di tingkat atas, sehingga memperkuat pola relasi hierarkis dalam pelaksanaan e-government. Selain itu, faktor sosial-politik juga berperan dalam membentuk dinamika pelaksanaan di lapangan. Rendahnya literasi digital masyarakat (Ramadan et al., 2024) dan minimnya efektivitas komunikasi pemerintah dalam memberikan sosialisasi turut memperdalam kesenjangan partisipasi publik. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara bersama pihak PUSKESOS Desa Taraju (2024), ditemukan bahwa jarak geografis antara pusat pemerintahan kabupaten dengan desa memperlemah koordinasi dan memperlambat proses administratif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan SIKS-NG tidak hanya menjadi tantangan teknis, melainkan juga arena interaksi politik antar aktor birokrasi dan sosial dalam mengelola kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Tahap evaluasi penerapan *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)* di Desa Taraju masih menunjukkan dinamika politik yang kompleks antar lembaga pemerintah. Evaluasi kebijakan yang seharusnya menjadi alat pengukuran kinerja program sering kali terpengaruh oleh kepentingan aktor birokrasi dan politik lokal. Proses evaluasi lebih banyak berfokus pada pelaporan administratif dibandingkan pengukuran substantif terhadap dampak sosial, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bahwa mekanisme

akuntabilitas antar lembaga (Government to Government) belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan transparan (Indrajit, 2002).

Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), dan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya sering kali diwarnai ketimpangan informasi serta tarik-menarik kewenangan dalam proses validasi dan pelaporan data. Hal ini sejalan dengan temuan Haromin (2022) yang menegaskan bahwa evaluasi berbasis digital masih menghadapi kendala dalam integrasi data antar lembaga pemerintahan yang berbeda tingkat kewenangan. Sementara itu, Windari dan Rodiyah (2024) menyoroti bahwa proses politik lokal seperti penentuan prioritas penerima bantuan, akses terhadap data, serta dukungan perangkat daerah menjadi faktor dominan yang memengaruhi hasil evaluasi program e-government.

Dalam konteks e-government, Indrajit (2002) menjelaskan bahwa terdapat beberapa model hubungan utama dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di antaranya Government to Government (G2G). Model G2G merupakan bentuk interaksi dan kolaborasi yang terjadi antar lembaga pemerintahan, baik pada tingkat vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (antar instansi seajar).

Dalam konteks penelitian ini, model G2G menjadi relevan untuk menganalisis dinamika politik dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis e-government di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Implementasi *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)* misalnya, melibatkan hubungan dan komunikasi politik antara berbagai tingkat

pemerintahan seperti Pemerintah Desa Taraju, Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), dan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Relasi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat unsur kepentingan, kewenangan, dan kekuasaan yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan.

Melalui pendekatan G2G, penelitian ini menelaah bagaimana koordinasi dan distribusi peran antar lembaga pemerintah menjadi arena politik tersendiri yang menentukan berhasil atau tidaknya penerapan *e-government* di tingkat desa. Dengan demikian, teori G2G menurut Indrajit dapat dijadikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis digital dijalankan melalui proses interaksi politik antar institusi pemerintahan, serta bagaimana dinamika tersebut memengaruhi hasil dan keberlanjutan kebijakan di lapangan.

Sebagian besar yang ditemukan pada penelitian terdahulu lebih cenderung pembahasan pada aspek implementasi dari aplikasi SIKS-NG, dan masih sedikit yang membahas secara runtut pada tahap perencanaan – evaluasi dari aplikasi SIKS-NG. Penelitian terdahulu juga ditemukan lebih banyak terfokus pada ruang lingkup Kota/Kabupaten sedangkan pada lingkup yang lebih sempit seperti pedesaan belum pernah dilakukan. Hal ini menjadi peluang untuk meninjau pelayanan *E-Government* dalam upaya pengentasan kemiskinan di ruang lingkup pedesaan seperti Desa Taraju. Desa Taraju adalah salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim ada di angka 1,13%, sehingga penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana peran

pelayanan *E-Government* dalam menekan angka kemiskinan di Desa Taraju (Open Data Kabupaten Tasikmalaya, 2024). Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya ialah salah satu Desa yang meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dengan nominasi pertama di seluruh Indonesia, sayangnya masyarakat desa taraju belum sepenuhnya dapat dikatakan sejahtera dalam hal kemiskinan, dalam hal itu tingkat kesejahteraan masyarakat desa taraju dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dengan julukan desa wisata seharusnya dapat memberdayakan masyarakat dengan baik. Selain itu, Desa Taraju merupakan salah satu desa yang memiliki stakeholder yang berperan penting sebagai aktor yang terlibat pada berjalannya pelaksanaan pelayanan *E-Government* melalui aplikasi SIKS-NG yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). PUSKESOS memiliki peran strategis sebagai penghubung langsung antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan data kemiskinan. Kondisi inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi dalam kajian ini, khususnya dalam konteks penerapan SIKS-NG di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

Walaupun telah dilakukan berbagai penelitian terkait dengan pelayanan SIKS-NG di berbagai daerah. Akan tetapi, penelitian di Desa Taraju memiliki perbedaan dalam hal perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Maka dari itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti SIKS-NG dalam tiga hal tersebut untuk pengembangan teoritik dan melengkapi *gap research* peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah disampaikan , maka permasalahan yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana dinamika politik pada tahap perencanaan pelayanan *E-Government* sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana dinamika politik pada tahap implementasi pelayanan *E-Government* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana dinamika politik pada tahap evaluasi pelayanan *E-Government* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan temuan permasalahan pada rumusan masalah, tentu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dinamika politik pada tahap perencanaan pelayanan *E-Government* (SIKS-NG) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis dinamika politik pada tahap pelaksanaan pelayanan *E-Government* (SIKS-NG) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk menganalisis dinamika politik pada tahap evaluasi pelayanan *E-Government* (SIKS-NG) sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terkait tentang dinamika politik *E-Government* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya, supaya menjadi acuan pembaharuan dan perbaikan sistem dalam proses pemadanan data masyarakat miskin di Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya, khususnya untuk meningkatkan keakuratan pemberian bantuan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Sebagai acuan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik terutama pada registrasi kependudukan melalui media digital.
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintahan kabupaten Tasikmalaya dalam membuat sebuah kebijakan tentang pengembangan pelayanan digital (*E-Government*) dalam menekan tingkat kemiskinan.
3. Sebagai bahan masukan atau referensi penelitian bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang melakukan penelitian di bidang atau penelitian yang sama.